

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan dan perhitungan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah terlaksana pada 14 —15 Februari 2024 secara serentak. Suasana politik di Indonesia memanas saat menjelang pemilu 2024 lalu. Hadirnya film dokumenter “*Dirty Vote*” telah menciptakan gelombang baru dalam diskusi publik mengenai integritas pemilihan umum tahun 2024. *Dirty Vote* dirilis empat hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Hal itu membuat banyaknya perbincangan dan menuai pro-kontra publik pada film dokumenter tersebut dikarenakan tayang pada saat masa tenang.

Film dokumenter *Dirty Vote* mengungkap kecurangan dalam pemilihan umum melalui sudut pandang para ahli hukum tata negara Indonesia. Banyaknya kecurangan yang terjadi secara terbuka dan tidak pernah ditindaklanjuti diperlihatkan dalam film ini. *Dirty Vote* menggambarkan bagaimana para politisi memanipulasi masyarakat demi kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan yang tampak jelas demi meraih kemenangan dalam pemilihan umum yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, film ini juga mempunyai pesan moral yang menekankan bahwa betapa pentingnya integritas dalam dunia politik serta tentang memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara dalam film ini menampilkan tiga ahli hukum tata negara dan tampil pada film dokumenter, yaitu Zainal Arifin

Mochtar, Feri Amsari dan Jentera Bivitri Susanti yang berperan sebagai aktor sekaligus *presenter*. Film dokumenter “*Dirty Vote*” dirilis pada 11 Februari 2024 melalui saluran resmi YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Film dokumenter yang berdurasi 1 jam 57 menit ini telah ditonton lebih dari 9,8 juta kali dan mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat (BBC Indonesia, 2024).



Gambar 1.1 *Thumbnail* Film Dokumenter *Dirty Vote*.

Film yang dibawakan oleh tiga pakar hukum negara ini memberikan penjabaran mengenai isu kecurangan dalam proses pemilu 2024. Ketiga pakar hukum menyatakan bahwa berbagai alat kekuasaan telah dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu, salah satunya penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kokoh dan terbuka untuk mempertahankan situasi tertentu. Fokus utama dalam film dokumenter *Dirty Vote* adalah pejabat negara dan juga tiga pasangan calon dan wakil presiden tahun 2024.

Ada beberapa sorotan mengenai kecurangan yang disebutkan dalam film ini. Mulai dari kombinasi suara Jokowi dan Prabowo di Pulau Sumatera

menunjukkan tanda-tanda politik transaksional di kalangan elit politik pada Pilpres 2014 dan 2019, ditunjuknya 82 PJ Walikota dan 20 PJ Gubernur oleh Presiden serta kekuasaan Tito Karnavian di Papua. *Dirty Vote* juga mengkritik pelanggaran keputusan Mahkamah Konstitusi pada kasus penunjukkan kepala daerah, hubungan Presiden dengan PJ Gubernur, serta ketidaknetralan Bupati dan PJ Gubernur.

Selain itu, film ini membahas kekuasaan yang dimiliki oleh PJ kepala daerah dalam melarang kegiatan kampanye, kontroversi terkait deklarasi desa bersatu mendukung pasangan calon tertentu, dan politisasi kasus penyalahgunaan dana desa. Film ini juga menyoroti adanya tekanan pada kepala desa untuk mendukung pasangan calon tertentu, kenaikan gaji ASN, Polri, dan pensiunan PNS pada tahun 2024. Kritik dalam film ini juga membeberkan pengabaian data dari Kemensos dalam distribusi bantuan sosial, pemanfaatan bansos sebagai alat politik, serta ketidaknetralan Presiden dan menteri-menteri yang berada di kubu koalisi 02.



Gambar 1.2 Pembahasan mengenai Bansos oleh Bivitri Susanti

Bawaslu dan KPU juga disoroti dalam film ini dikarenakan dinilai tidak profesional dan banyak melakukan pelanggaran. Selain itu, film ini membahas

kaitan antara putusan MK dan kritik terhadap ketua KPU yang beberapa kali mendapat teguran terkait kontroversi keputusan MK. Berdasarkan hal tersebut, film ini menggambarkan suasana kelam dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran. Hal ini bisa saja merubah keputusan para pemilih setelah melihat film dokumenter tersebut. Tetapi, meskipun beberapa cuplikan dibuktikan dengan data, tetap saja akan ada keraguan di dalamnya dikarenakan sudut pandang yang digunakan dari penegak hukum.



Gambar 1.3 Cuplikan Tiga Penegak Hukum dalam Film Dirty Vote

Sejak rilisnya film *Dirty Vote* tentunya menjadi *trending* topik di medsos, terpantau banyaknya tokoh publik yang mengomentari atas hadirnya film ini. Sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi terhadap kehadiran film dokumenter *Dirty Vote* meskipun ada yang menganggap sebagai upaya agar merusak citra salah satu pasangan calon. Gemparnya film *Dirty Vote* di seluruh media membuat banyak masyarakat yang masih belum melihat menjadi tambah ingin tahu dan tertarik untuk secepatnya menonton (Yulianti, 2024).

Film *Dirty Vote* tidak hanya mendapat tanggapan dari *netizen* atau tokoh publik saja, tetapi tim kampanye dari ketiga calon pasangan presiden dan wakil presiden yang diisukan dalam film ini juga membuka suara. Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi bahwa ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024, sehingga Anis mengimbau pihak yang terlibat dalam praktik tersebut untuk menghentikannya. Anis juga menekankan pada rakyat untuk berpikir menggunakan hati nurani pada saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 (Rianti, 2024).

Adapun tanggapan dari capres 03, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa film *Dirty Vote* ini merupakan sebuah edukasi untuk publik yang bisa menjaga demokrasi (Purbaya, 2024). Menurut TPN Ganjar-Mahfud, temuan yang diungkap dalam film dokumenter tersebut tidaklah baru dan masih relevan dengan situasi saat ini. Mereka berpendapat bahwa film *Dirty Vote* dapat mengingatkan masyarakat akan maraknya pelanggaran dalam Pemilu 2024 (CNN Indonesia, 2024).

Tanggapan dari kedua pasangan calon bisa disimpulkan setuju dan tidak masalah dengan adanya isu dan kritik yang ada di dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Berbeda dengan TKN Prabowo-Gibran yang menyebutkan bahwasannya film ini berisikan fitnah serta rasa kebencian yang asumtif dan kebenaran pakar-pakar hukum harus dipertanyakan (CNN Indonesia, 2024). Hal ini dikarenakan isi dari film dokumenter *Dirty Vote* memperlihatkan lebih banyak isu dan kecurangan yang ditimbulkan dari pasangan calon 02 berdasarkan pandangan hukum.

Sutradara film “*Dirty Vote*”, Dandhy Laksono adalah seorang jurnalis berpengalaman yang dikenal sebagai wartawan, aktivis, dan juga *Chief Revenue Officer* (CRO) dari rumah produksi film dokumenter *WatchDoc*. Dhandy mengatakan film ini bisa menjadi edukasi bagi penonton dan masyarakat menjelang pemungutan suara dan mengajak setiap penonton berperan sebagai warga negara dan bukan pendukung capres atau cawapres (Saptohutomo, 2024).

Sebelum terlibat dalam pembuatan film dokumenter "*Dirty Vote*", Dandhy Laksono telah membuat karya dokumenter yang mengangkat isu-isu penting dalam Indonesia. Salah satunya adalah "*The Bajau*" 2020, yang membahas kehidupan dan menampilkan pandangan suku Bajo terhadap laut sebagai rumah dan sumber mata pencaharian. Kemudian rilis juga film dokumenter "*Sexy Killers*" yang mengungkap sisi kelam industri tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak besar pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, film ini juga dirilis setelah pemilu 2019 lalu.

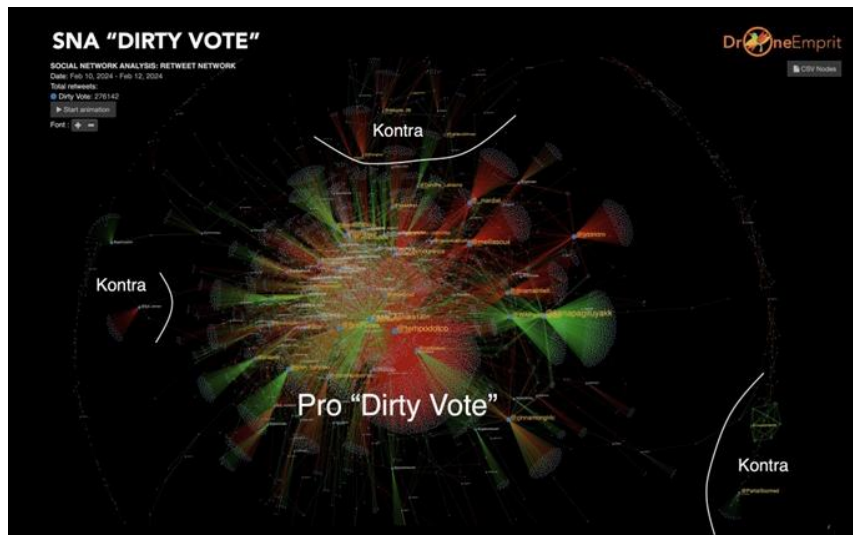
Film dokumenter “*Sexy Killers*” dan “*Dirty Vote*” karya Dhandy ini memiliki kesamaan dengan gaya film dokumenter dari sutradara Amerika, Michael Moore. Moore dikenal karena kritik sosialnya terhadap berbagai isu, termasuk pemerintahan George W. Bush, perang di Irak, kekerasan dengan senjata api, dan kritik terhadap kebijakan publik. Salah satu karyanya adalah "*Fahrenheit 11/9*" yang menyoroti tuntutan rakyat Amerika terhadap presiden mereka dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap menipu. Karakteristik Moore dalam filmnya adalah penggunaan bahasa yang tajam dan keberaniannya untuk menantang politikus, terutama di Amerika (John S. Oberacker, dalam Nisfahturrohmah, 2022).

Menurut Michael Chanan dalam Sasono (2019), film dokumenter dibuat untuk berkomunikasi dengan penonton sebagai individu yang terlibat dalam konteks politik dan sosialnya. Hal ini membuka peluang untuk pembentukan film dokumenter naratif dan melibatkan penonton sebagai warga negara atau entitas yang lebih besar daripada film fiksi yang sering kali memanipulasi psikologis penontonnya (Sasono, 2019). Film dokumenter juga dibuat untuk menyampaikan isu atau cerita yang didasarkan pada kejadian yang benar-benar ada (Wahyuni, *et al* 2024).

Kekuatan sebuah film dokumenter yang menampilkan aktor dan latar belakang yang nyata sering kali dapat membangkitkan emosi penonton dengan mudah. Terlebih film yang ditampilkan bersinggungan langsung dengan aspek politik, budaya, atau kepentingan penonton (Utari, 2020). Film dokumenter sering digunakan dalam gerakan sosial karena dianggap mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan aktivis untuk menyampaikan isu-isu sosial kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang masalah yang ada. Terlebih dengan adanya media sosial di zaman saat ini membuat penyebaran film dokumenter lebih cepat sampai kepada masyarakat.

Media sosial menjadi tempat untuk penggunaanya menyebarkan informasi secara luas dan cepat di segala bidang. Dalam hal ini, platform penyedia layanan video seperti YouTube memainkan peran yang penting termasuk sebagai salah satu kanal utama penyampaian informasi politik (Arofah, 2015). Film dokumenter *Dirty Vote* yang diunggah melalui platform YouTube ini pun sukses membuat gempuran di masyarakat terutama pada media sosial. Perbincangan mengenai isu-isu dan

kecurangan pemilu di dalamnya menjadi *trending* topik sejak tayang hingga dilaksanakannya pemilu.



Gambar 1.4 Peta SNA “Dirty Vote” di Media Sosial Twitter.

Trending topik tentang film *Dirty Vote* ini dapat dilihat dalam media sosial Twitter. Peningkatan volume percakapan terjadi sejak pengumuman perilis film pada 10 Februari 2024 di YouTube, berlanjut saat peluncuran pada 11 Februari, dan terus meningkat selama perdebatan pada hari berikutnya. Menurut hasil analisis dari *Drone Emprit* oleh Ismail Fahmi pada akun Twitter @ismailfahmi, volume percakapan “*Dirty Vote*” di media Twitter mencapai lebih dari 276 ribu *mentions* hingga 13 Februari 2024. Dilihat dari Peta Analisis Jaringan Sosial (SNA) Sentimen “*Dirty Vote*” di Twitter sebanyak 43% mendukung film ini, sementara 50% lainnya mengekspresikan kritik terhadap tokoh yang disebutkan dalam film, dan adapun beberapa kritikan untuk film ini dari pihak yang tidak setuju.

Selain pro-kontra yang terlihat di media sosial, beberapa pakar komunikasi politik juga memberikan penilaian terhadap isu yang ditampilkan pada film

tersebut. Salah satunya pakar komunikasi politik yaitu Dr Suko Widodo yang menilai bahwa persepsi masyarakat terhadap film tersebut dibentuk dari narasi kecurangan pemilu yang sudah diberitakan sejak lama. Menurutnya, film ini masuk dalam dua kategori yakni film edukasi dan kritik meskipun narasi di dalamnya perlu dikonfirmasi dalam dialog politik (Pratiwi, 2024).

Film *Dirty Vote* menyiratkan bahwa proses pemilihan umum di 2024 harus bisa terlaksana dengan jujur dan adil sehingga tidak ada suara yang kotor. Maka dari itu, isi dalam film tersebut membuka mengenai kecurangan beberapa politisi yang tujuannya untuk kemenangan dalam pemilu 2024 dan merusak tatanan demokrasi. Tanggapan dari sutradara film tersebut Dhandy Laksono berharap bahwa film ini menjadi edukasi menjelang pemilihan suara dan bisa ditonton dengan pikiran terbuka sebagai warna negara dan bukan pendukung capres-cawapres (Meiliana, 2024).

Berdasarkan isi film "*Dirty Vote*", film ini menggambarkan betapa kotor proses berjalannya pemilu 2024 yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa film tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi sebagai sarana penerangan dan pendidikan (Effendy, 2003). Dengan demikian, film mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pendapat dan perspektif masyarakat terhadap suatu isu. Meski kontroversial, *Dirty Vote* ini menjadi bahan perdebatan di media sosial dan dinilai sebagai upaya kampanye tersembunyi untuk meningkatkan golput pada pemilihan umum 2024 serta menjatuhkan pasangan calon tertentu (Yulianti, 2024).

Pada penelitian ini, *framing* digunakan untuk memahami pesan mengenai isu kecurangan dalam Pemilu 2024. *Framing* memiliki dua aspek utama, yaitu memilih realitas dan menyajikan fakta. Memilih realitas atau fakta, terdapat dua kemungkinan, yakni apa yang dipilih dan apa yang dibuat. Hal ini berarti suatu peristiwa dilihat dan disampaikan dari perspektif tertentu. Aspek kedua, menyajikan fakta, melibatkan penyampaian peristiwa dengan kata-kata, kalimat, serta data atau gambar. Fakta yang dipilih bertujuan untuk menekankan pesan tertentu, seperti pemberian label, pengulangan kata kunci, penggunaan gambar yang menarik perhatian, dan penggunaan judul yang provokatif (Eriyanto, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai film dokumenter “*Dirty Vote*” terkait bagaimana *framing* yang dilakukan terhadap pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menuangkannya dalam judul “Analisis *Framing* Pemilihan Umum 2024 dalam Film Dokumenter *Dirty Vote*.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemilihan umum 2024 dibingkai dalam film *Dirty Vote*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkaiian pemilihan umum 2024 dalam film *Dirty Vote*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi ilmiah di dalam bidang studi ilmu komunikasi yang berhubungan dengan kajian isu-isu sosial yang ada di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini adalah untuk mengetahui pbingkaian pemilihan umum tahun 2024 yang ada dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Penelitian juga dapat digunakan untuk salah satu referensi keilmuan bagi mahasiswa, masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk mengetahui tentang penelitian yang sama